



Pemda DIY Harus Tanggung Jawab Warga Isoman

YOGYA (KR) - Komisi A DPRD DIY meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tetap bertanggung jawab terhadap semua warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Baik yang menjalani isolasi mandiri di rumah, isoter maupun rumah sakit.

Pasalnya dari data yang terkonfirmasi positif, saat ini didominasi isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan mereka tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan hingga permakanan. Tidak harus mendatangi satu persatu, melainkan dapat memanfaatkan teknologi yang

ada.

"Bisa melalui *WhatsApp* ataupun *telemedicine*. Jika memang ada yang membutuhkan obat maka harus segera diberikan. Meskipun masyarakat dapat membeli sendiri. Tapi pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menyediakannya," kata Ketua

Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dalam jumpa pers, Senin (7/3).

Eko menyarankan kepada masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 untuk isolasi di isoter saja. Karena di sana telah tersedia petugas kesehatan yang dapat memantau secara rutin. Jika dalam status tertentu dapat langsung diputuskan untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Karena tidak semua rumah di DIY itu memenuhi standar untuk isolasi.

"Misalnya kamar mandi hanya satu atau tidak ada

kamar tidur kosong yang dapat dijadikan tempat isolasi bagi yang positif. Ini juga untuk menghindari munculnya kluster keluarga," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan mengenai Pemda DIY telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui APBD 2022 sebesar Rp 94,7 miliar.

Tak hanya itu di masing-masing kabupaten/kota juga ada dana BTT dengan nominal beragam. Kabupaten Gunungkidul Rp 48,3 miliar, Kulonprogo Rp 21,3 miliar, Kota

Yogyakarta Rp 56,3 miliar, Kabupaten Bantul 35,7 miliar dan Kabupaten Sleman Rp 52,5 miliar.

"Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana. Termasuk untuk penanganan Covid-19. Dana itu dapat segera dialokasikan untuk mendukung berbagai upaya penanganan Covid-19. Seperti jaminan tenaga kesehatan, RS hingga jaminan ketersediaan oksigen. Artinya, dana tersebut dapat segera dialokasikan," jelasnya.

(Awh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005